

Penanaman Nilai Nasionalisme Dalam Pendidikan Karakter Di Indonesia Melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter

Cucu Sutrisno¹, Samsuri²
Universitas Negeri Yogyakarta
Email: Cucu_sutrisno@uny.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkap penanaman nilai nasionalisme dalam pendidikan karakter di Indonesia penanaman nilai nasionalisme dalam pendidikan karakter di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten yang bersifat inferensial berupa proses mendeskripsikan, mengklasifikasi, memaknai dan menyimpulkan relevansi pendidikan karakter di Indonesia sebagai pendidikan nasionalisme. Sumber data yang digunakan untuk analisis konten yakni: 1) Dokumen resmi yang memuat mengenai desain Pendidikan karakter dalam Gerakan PPK sejak tahun 2017-2021 berupa peraturan perundang-undangan serta pedoman implementasi Gerakan PPK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia mengacu pada konsepsi pendidikan karakter dalam Gerakan PPK. Nilai nasionalisme adalah salah satu nilai utama (prioritas) dalam pendidikan karakter. Namun pemaknaannya masih bersifat usang dan kurang sesuai dengan pemaknaan yang ideal. Perlu ada pemaknaan ulang nasionalisme yang digunakan dalam pendidikan karakter tersebut agar dapat mencapai substansi nasionalisme yang mencakup keadilan sosial, kemerdekaan, kesejahteraan, demokrasi dan prestasi bukan hanya sebatas kecintaan dan kebanggaan disertai kerelaan berkorban (patriotisme) tanpa pamrih bagi bangsa dan negara.

Kata kunci : *nasionalisme, pendidikan karakter, penanaman nilai.*

ABSTRACT

This study aims to reveal the inculcation of nationalism values in character education in Indonesia, the inculcation of nationalism values in character education in Indonesia. This study uses an inferential content analysis method in the form of a process of describing, classifying, interpreting and concluding the relevance of character education in Indonesia as nationalism education. The data sources used for content analysis are: 1) Official documents containing the design of character education in the PPK Program from 2017-2021 in the form of laws and regulations and guidelines for the implementation of the PPK Program. The results of this research show that character education in Indonesia refers to the conception of character education in the PPK Program. The value of nationalism is one of the main values (priority) in character education. However, its meaning is still obsolete and not in accordance with the current context. There needs to be a redefinition of nationalism used in character education in order to achieve the substance of nationalism which includes social justice, independence, prosperity, democracy and achievement, not only limited to love and pride accompanied by selfless self-sacrifice (patriotism) for the nation and country.

Keywords : *nationalisme, character education, value investment.*

PENDAHULUAN

Nasionalisme bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi pada Abad 21 ini yaitu, ancaman memudarnya nasionalisme dan identitas nasional. Memudarnya sekat-sekat ruang dan waktu serta semakin mudahnya pemerolehan informasi yang ditopang oleh makin pesatnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi di Abad 21 yang telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, menyebabkan mudah terjadinya persebaran nilai dan budaya dari luar diri Bangsa Indonesia. Globalisasi menyebabkan adanya disorientasi nilai dan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat (Pangestu, 2022). Kendati Bangsa dan Negara Indonesia bukanlah entitas yang tertutup terhadap dunia luar serta perubahan-perubahannya, namun Bangsa dan Negara Indonesia haruslah menjadi entitas yang selektif menyaring segala hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya bangsanya. Sebab, Indonesia sebagai sebuah negara bangsa memiliki jatidiri dan identitas yang harus dipegang teguh oleh segenap elemen Bangsa dan Negara Indonesia sendiri.

Makin mewabahnya radikalisme adalah salah satu bentuk memudarnya nasionalisme dan identitas nasional. Radikalisme sebagaimana mengacu pada konsepsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah suatu ideologi yang memiliki beberapa ciri: *Pertama,*

menggunakan kekerasan atas nama agama untuk merubah tatanan yang ada. *Kedua,* antidemokrasi, NKRI dan Pancasila. *Ketiga,* berpaham *takfiri* (mengkafirkan orang lain). Keberadaan radikalisme dan intoleransi didalamnya menghadirkan instabilitas sosial dan keamanan serta cepat atau lambat akan mengoyak integrasi berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, radikalisme merupakan ancaman nyata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa sehingga upaya-upaya penanganannya tidak boleh tidak untuk terus gencar dilaksanakan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Salah satu yang kerap menjadi media penyebaran radikalisme adalah lembaga pendidikan yang merupakan media tradisional atau tempat yang kerap menjadi ruang persebaran radikalisme (*hotspots*). Pada lembaga pendidikan sekolah jenjang menengah atas, persemaian dan pengembangan radikalisme kerap kali memanfaatkan penyalahgunaan ekstrakurikuler Kerohanian Islam (Rohis) yakni dengan mengarahkan pembinaan Rohis pada menjadi proses doktrin ideologi radikal. Upaya radikalisasi di sekolah kerap kali dilakukan melalui kegiatan mentoring agama Islam yang merupakan kegiatan rutin Rohis di sekolah. Pemanfaatan lembaga pendidikan sebagai media inkubator sekaligus penyemaian radikalisme dilatarbelakangi oleh strategisnya posisi lembaga ini sebagai pranata

sosial yang menentukan kondisi sosial masyarakat dimasa kini dan masa mendatang melalui generasi muda yang dididik didalamnya. Radikalisasi dalam sektor pendidikan menysar peserta didik yang secara psikologis masih dalam masa pencarian jatidiri yang haus akan pengetahuan, dan kebenaran. Pada kondisi demikian, peserta didik yang *notabene* kaum muda (*youth*) lebih banyak memiliki kecenderungan dan kemungkinan untuk terlibat dan menerima radikalisme dibandingkan orang dewasa (*adult*). Krisis identitas pada diri kaum muda memungkinkan mereka mengalami *cognitive opening* (pembukaan kognitif) yang memudahkan adanya penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal (Azca, 2013).

Penanaman nilai nasionalisme pada diri generasi muda Bangsa Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebab, generasi muda bangsa Indonesia terutama yang masih berada pada usia sekolah menengah berada pada fase kritis perkembangan manusia karena merupakan masa pembentukan kematangan emosional dan masa pencarian identitas diri (Elias et al., 2003). Apalagi remaja saat ini mendapatkan banyak bahaya bagi pengembangan jatidirinya akibat pengaruh negatif di media dan sumber eksternal lainnya yang telah dianggap lazim dalam budaya saat ini. Pembimbingan diperlukan agar generasi muda mengetahui mana yang benar dan yang salah serta untuk melatih pengendalian diri dan konsistensi mereka dalam bersikap dan bertindak dengan baik dan benar (Pala, 2011).

Pendidikan yang ditujukan untuk menenamkan nilai nasionalisme sangat penting agar generasi muda memiliki modal untuk menghadapi tantangan di Era Globalisasi pada Abad 21. Secara historis, nasionalisme di bumi Indonesia telah ada sejak lama bahkan pada kerajaan Majapahit berkuasa yang digelorakan oleh Maha Patih Gajah mada dengan visi globalisasinya yaitu yang terkenal dengan istilah “Sumpah Palapa” untuk menyatukan wilayah Majapahit dengan seluruh wilayah Nusantara (Mifdal Zusron Affaqi, 2016). Nasionalisme Indonesia sebagai tonggak berdirinya Negara Indonesia bertumbuh pada masa pergerakan dalam rangka melawan penderitaan dan kesengsaraan akibat kolonialisme kala itu hingga mewujud menjadi persekutuan hidup bersama bangsa Indonesia di atas sebuah negara. Nasionalisme diperankan sebagai ideologi persatuan melawan ketertindasan menuju kehidupan yang bebas dan merdeka (Kahin, 2013). Nasionalisme erat kaitannya dengan keberadaan dan eksistensi negara-bangsa (Lay, 2006). Oleh karena itu, nasionalisme kerap dimaknai sebagai kecintaan/kebanggaan pada suatu bangsa-negara yang keberadaannya harus dijaga dengan segenap jiwa dan raga. Namun demikian, pemaknaan nasionalisme hanya sebatas pada kecintaan terhadap tanah air tanpa pamrih sebagai simbol patriotisme heroik demi negara yang dicintai adalah pendefinisian yang usang dan tidak relevan dengan masa kini. Oleh karena itu, sikap nasionalisme harus dimaknai ulang sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab

sebagai warga negara. Implementasi melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme berupa cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional (Faturochman & Kusumawardani, 2004).

Pendidikan nasionalisme yang tepat sangat dibutuhkan generasi muda Bangsa Indonesia agar menjadi insan yang resilien untuk menghadapi tantangan di abad 21 dan menyongsong Generasi Emas Indonesia di Tahun 2045. Carut-marutnya kondisi sosial-kebudayaan akhir-akhir ini yang berkelindan dengan kemerosotan moralitas akibat kegamangan dalam bersikap ditengah disparitas nilai dan kebudayaan akibat bergulirnya Era Disrupsi dan Era Digital adalah peluit tanda bahaya yang harus di respon dengan cepat dan tepat. Apalagi, seiring dengan berubahnya lingkungan dan berkembangnya zaman, semangat nasionalisme juga akan mengalami perubahan. Ada dua faktor pendorong yang mewujudkan nasionalisme yakni faktor obyektif dan subyektif. Faktor obyektif terkait dengan bangsa, bahasa, wilayah, nilai-nilai dan budaya tradisional yang keberadaannya cenderung tetap/tidak berubah. Faktor subyektif yakni persepsi, sikap, perilaku serta nilai-nilai dan budaya kontemporer yang menjadi lingkungan hidup generasi

terkini (Wahyono, 2008). Untuk itu, pendidikan nasionalisme harus mampu membangun generasi muda generasi muda agar mampu memiliki pemikiran, sikap dan perilaku yang sejalan dengan semangat nasionalisme namun tetap kontekstual sesuai zamannya.

Pemerintah Indonesia melalui kuasa kebijakannya telah mengembangkan pendidikan karakter bagi siswa di sekolah yang pada tahun 2017 dilakukan melalui diadakannya Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pada desain pendidikan karakter tersebut, nilai nasionalisme menjadi salah satu dari nilai utama yang hendak ditanamkan pada diri siswa. Hal ini menarik untuk dikaji bagaimanakah konsepsi pendidikan karakter untuk menanamkan nilai nasionalisme tersebut. Lalu apakah pendidikan karakter tersebut telah memiliki konsepsi yang tepat untuk menanamkan nilai nasionalisme sesuai konteks dan kebutuhan generasi muda masa kini?

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten yang bersifat inferensial (*inferential content analysis*). Fokus penelitiannya terletak pada konsepsi pendidikan nasionalisme dalam desain pendidikan karakter di sekolah pada Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter. Peneliti ini menggunakan suatu konstruk analitis sebagai dasar inferensi (Zuchdi & Afifah, 2019). Konstruk analitis dalam penelitian ini yaitu Pendidikan Karakter dalam Gerakan PPK memuat penanaman

nilai nasionalisme. Sumber data penelitian meliputi infografis, modul dan buku saku untuk panduan implementasi Gerakan PPK serta peraturan perundang-undangan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui laman <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/> yakni (1) Buku Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan karakter; (2) Infografis Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter; (3) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Kelas; (4) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Budaya Sekolah; (5) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Masyarakat; (6) Buku Panduan Praktis Pelibatan Tripusat Pendidikan dalam PPK oleh Kepala Sekolah; (7) Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; dan (8) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Prosedur analisis konten pada penelitian ini meliputi (1) pengadaan data; (2) pengurangan (reduksi) data; (3) Inferensi; (4) Analisis (Zuchdi & Afifah, 2019). *Pertama*, pengadaan data dalam penelitian ini berupa penentuan unit, penentuan sampel, dan pencatatan data mengenai penanaman nilai nasionalisme dalam pendidikan karakter di Indonesia melalui Gerakan PPK. *Kedua*, pengurangan (reduksi) data melalui penghilangan data yang tidak relevan. *Ketiga*, inferensi dengan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengurangi makna simboliknya dan dengan menggunakan konstruk analisis yakni Pendidikan Karakter dalam Gerakan PPK memuat penanaman nilai nasionalisme. *Keempat*, analisis kualitatif untuk

menganalisis konsepsi penanaman nilai nasionalisme dalam desain pendidikan karakter di Indonesia melalui Gerakan PPK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Pendidikan Karakter Pada Gerakan PPK dalam Penanaman Nilai Nasionalisme

Kemunculan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bermula dari Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Melalui gerakan ini, sekolah diarahkan untuk dapat melaksanakan pendidikan karakter secara lebih masif dan terencana di sekolah. Bisa dikatakan bahwa Gerakan PPK adalah lanjutan serta revitalisasi dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter yang dimulai pada tahun 2010 (Faturrahman et al., 2022).

Kehadiran Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sangat bernuansa politis. Pencanaan Gerakan PPK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah tindak lanjut atas adanya arahan Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter dalam rangka merealisasikan Nawacita (Nwacita 8) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional

Revolusi Mental (GNRM) setelah ia mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presidennya pada periode 2014-2019. Oleh karena itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal secara eksplisit disebutkan bahwa:

“Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)” (Kemendikbud, 2018).

Revolusi Mental, selain sebagai jargon kampanye Jokowi-JK pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang kemudian menjadi basis bagi penyusunan program pemerintah melalui dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2016 Tentang Gerakan nasional Revolusi Mental dan peraturan pendukung lainnya. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Umum Gerakan Nasional revolusi mental disebutkan bahwa ide dasar dari Revolusi Mental adalah membangun jiwa bangsa, yaitu jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Semangat Revolusi Mental adalah melanjutkan perjuangan besar mengisi janji kemerdekaan yang dinyatakan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957, yang bertujuan untuk membangkitkan lagi semangat perubahan berkemajuan bangsa Indonesia (Hendarman, 2017).

Pada pendidikan karakter dalam Gerakan PPK, nilai nasionalisme menjadi salah satu dari lima nilai utama (prioritas) yang ditanamkan pada siswa. Nilai-nilai karakter itu dianggap sebagai aktualisasi Pancasila, 3 Pilar Gerakan Revolusi Mental, nilai-nilai kearifan lokal dan tantangan masa depan. Nilai karakter nasionalis didefinisikan sebagai cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin menghormati keragaman budaya, suku, dan agama (Hendarman, 2017).

Gerakan PPK merupakan gerakan pendidikan karakter di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa

(estetis), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik) dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Penguatan pendidikan karakter dalam program ini dilakukan gerakan berbasis kelas, berbasis budaya sekolah dan berbasis masyarakat serta dilaksanakan melalui pengintegrasian pada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler oleh stakeholder sekolah. Gerakan PPK tidak mengubah kurikulum yang sudah ada melainkan optimalisasi kurikulum pada satuan pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta nonkurikuler di lingkungan sekolah. Gerakan yang difokuskan pada pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini menekankan kemitraan tripusat pendidikan (sekolah, keluarga dan masyarakat) dengan menempatkan sekolah sebagai pemrakarsa kemitraan tersebut (Hendarman, 2017).

Pendidikan karakter melalui optimalisasi kurikulum sekolah dapat ditempuh dengan tiga cara yakni (1) pengintegrasian pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum maupun mata pelajaran muatan lokal melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Untuk itu, setiap guru harus mengembangkan rencana pembelajaran yang mendukung penguatan pendidikan karakter sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing; (2) pengimplementasian pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dilakukan

melalui kolaborasi dengan masyarakat dan pihak lain/lembaga yang relevan; (3) pembentukan kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah secara rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah yang dilakukan di luar jam pembelajaran sesuai dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan. Selain itu, adapula struktur pendukung lain yakni pembentukan eksosistem dan budaya sekolah yang baik serta kemitraan dengan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan karakter (Hendarman, 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada tiga basis pendidikan karakter dalam Gerakan PPK yakni berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Pendidikan karakter berbasis kelas berupa (1) pengintegrasian proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik itu secara tematik maupun terintegrasi dalam mata pelajaran; (2) penguatan manajemen kelas, pilihan metodologi, dan evaluasi pengajaran; (3) penguatan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah berupa (1) penekanan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah; (2) pengarusutamaan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan; (3) pelibatan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah; (4) pengembangan dan pemberian ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; (5) pemberdayaan manajemen dan tata kelola sekolah; dan (6) Mempertimbangkan norma,

peraturan, dan tradisi sekolah. Terakhir, pendidikan karakter berbasis masyarakat berupa (1) penguatan peranan Komite Sekolah dan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan; (2) pelibatan dan pemberdayaan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; (3) mensinergikan pendidikan karakter dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM; dan (4) mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya (Hendarman, 2017).

Relevansi pendidikan karakter di Indonesia sebagai pendidikan nasionalisme

Pendidikan karakter dapat dimaknai serupa dengan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti atau pendidikan moral. Pendidikan budi pekerti adalah upaya membangun kecerdasan budi pekerti agar manusia dapat menguasai dirinya sehingga tidak lagi memiliki jiwa yang jahat atau setidak-tidaknya mengurangi tabiat-tabiat yang jahat yang ada dalam dirinya (Dewantara, 2011). Hal ini berarti bahwa pendidikan budi pekerti adalah sebuah tuntunan yang mengarahkan seseorang untuk memiliki budi pekerti yang baik. Beririsan dengan makna tersebut, pendidikan karakter adalah pendekatan yang secara langsung difokuskan untuk merubah perilaku moral manusia (Carr, 2014).

Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk mempromosikan pengembangan kebajikan, nilai-nilai moral, dan *moral agency* terutama yang dilaksanakan di sekolah (Berkowitz & Hoppe, 2009).

Pendidikan karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*) dan melakukan kebaikan (*doing the good*) (Lickona, 1991). Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti (Sudrajat, 2011). Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah saja namun lebih dari itu juga menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik (Marzuki, 2012). Secara singkat, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai mengetahui yang baik (*knowing the good*), merasakan dengan baik (*loving the good*), dan melakukan hal yang baik (*doing the good*). Berdasarkan definisi itu, pendidikan karakter meliputi ranah kognitif, afektif, dan perilaku serta mencakup strategi mulai dari penalaran moral dan dilema etika hingga klarifikasi nilai dan bahkan pembelajaran layanan masyarakat (Williams, 2000).

Pendidikan karakter merupakan sebuah ikhtiar untuk mengarahkan seseorang agar berkarakter baik. Kata karakter dalam bahasa Yunani kuno berarti “mengukir,”. Secara harfiah “karakter” adalah ciri-ciri yang

terukir pada diri seseorang yang mempengaruhinya dalam berperilaku (Agboola & Chen, 2012; Katilmiş et al., 2011) Secara terminologis, karakter merupakan kesiapan batin untuk merespon situasi dengan cara yang baik dan bermoral. Karakter mulia (*good character*), meliputi pengetahuan tentang kebaikan (*moral knowing*), lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan (*moral feeling*), dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (*moral behavior*) (Marzuki, 2012). Karakter yang baik berarti mengetahui kebaikan, memiliki kebaikan dan melakukan (Katilmiş et al., 2011). Karakter berarti sekumpulan karakteristik psikologis yang kompleks yang memungkinkan seseorang untuk bertindak sebagai agen moral (Berkowitz & Bier, 2004).

Nilai-nilai karakter merupakan hal pokok dalam pendidikan karakter. Sebab, nilai karakter merupakan muatan pendidikan karakter yang akan diberikan kepada siswa. Kepemilikan nilai karakter oleh siswa merupakan aspek yang dituju oleh pendidikan karakter. Nasionalisme merupakan salah satu nilai dalam pendidikan karakter di Indonesia. Sebelum menjadi salah satu nilai utama (prioritas) dalam pendidikan Karakter pada Gerakan PPK, nasionalisme juga merupakan salah satu nilai dalam pendidikan karakter yang dikembangkan pada tahun 2010. Pada tahun 2010, Direktorat Pembinaan SMP Kemdikbud RI yang mengembangkan nilai-nilai utama yang disarikan dari butir-butir standar kompetensi lulusan (Permendiknas No. 23 tahun 2006) dan dari nilai-nilai utama yang dikembangkan oleh Pusat

Kurikulum Depdiknas RI, menempatkan nilai nasionalisme sebagai salah satu dari 24 nilai karakter bagi peserta didik (Marzuki, 2012; Muchtar & Suryani, 2019).

Nasionalisme bagi bangsa dan negara Indonesia tertu terkait dengan nasionalisme keindonesiaan. Nasionalisme Indonesia terkait dengan kebangsaan atau persatuan bangsa dalam rangka melawan kolonialisme dan penjajahan. Nasionalisme diperankan sebagai ideologi persatuan melawan ketertindasan menuju kehidupan yang bebas dan merdeka (Kahin, 2013). Nasionalisme erat kaitannya dengan keberadaan dan eksistensi negara-bangsa. Nasionalisme mengandung unsur emosionalitas berupa semangat kebersamaan berdasar kesamaan perasaan dan nasib yang diikuti kehendak untuk membangun suatu bangsa yang mandiri berlandaskan kesatuan jiwa dan kesetiakawanan, kehendak untuk bersatu, serta menciptakan keadilan dan kebersamaan menuju terbentuknya bangsa yang berdaulat dan bermartabat (Pangestu, 2022). Namun demikian, nasionalisme bukan sebatas sebagai hak monopoli negara dan kewajiban mutlak masyarakat untuk berkorban tanpa pamrih bagi bangsa dan negaranya. Sebaliknya, nasionalisme memiliki dimensi internal (substansi) berupa keadilan sosial, kemerdekaan, demokrasi, kesamaan dan prestasi sebab nasionalisme dan negara bangsa adalah pakta perjanjian yang menempatkan kesjajaran antara masa rakyat dengan penguasa sekaligus didalamnya melekat impian-impian dan harapan rakyat yang harus di wujudkan sebagai

bagian integral dari pakta perjanjian (Lay, 2006). Oleh karena itu, benar kiranya jika makna nasionalisme bukanlah sebatas semangat kebangsaan dengan kerelaan berkorban (*patriotisme*) tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Pendefinisian semacam itu adalah pemaknaan yang usang dan tidak relevan dengan masa kini. Oleh karena itu, sikap nasionalisme harus dimaknai sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Implementasinya melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme berupa cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional (Faturochman & Kusumawardani, 2004).

Pendidikan karakter di sekolah melalui Gerakan PPK disebut untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati (*etik*), olah rasa (*estetis*), olah pikir (*literasi*), dan olah raga (*kinestetik*). ini memang diadaptasi dari pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan haruslah merupakan harmonisasi olah hati (*etik*), olah rasa (*estetik*), olah pikir (*literasi*) dan olah raga (*kinestetik*) (Zulfiati, 2019). Hal itu terkait dengan Trisakti Jiwa (tiga kekuatan jiwa) dalam makna kebudayaan manusia yakni fikiran, perasaan dan kemauan (*cipta, rasa*

dan *karsa*). Unsur cipta terkait ranah kognitif, unsur rasa terkait ranah afektif, dan unsur karsa terkait ranah psikomotorik. Ini sejalan dengan pemikiran pendidikan karakter bahwa ia mencakup aspek mengetahui yang baik (*knowing the good*), merasakan dengan baik (*loving the good*), dan melakukan hal yang baik (*doing the good*) (ranah kognitif, afektif, dan perilaku). Dalam menanamkan nilai nasionalisme, ranah kognitif terkait dengan pengetahuan mengenai nilai nasionalisme Indonesia (bangsa, bahasa, wilayah, nilai-nilai dan budaya tradisional), ranah afektif terkait dengan persepsi, sikap, dan perasaan yang mendukung semangat cinta tanah air dan bangsa dan ranah perilaku terkait dengan perwujudan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai nasionalisme. Pemaknaan nasionalisme pada pendidikan karakter Gerakan PPK sebagaimana telah di bahas sebelumnya tidak menampilkan pemaknaan yang tepat namun justru hanya menampilkan pendefinisian yang usang dan tidak relevan dengan pemaknaan yang ideal.

SIMPULAN

Keberadaan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang mengharuskan sekolah untuk dapat melaksanakan pendidikan karakter secara lebih masif dan terencana di sekolah adalah bagian dari pembangunan pendidikan karakter di Indonesia. Kendati demikian, kemunculannya bernuansa politis sebab Gerakan PPK adalah salah satu bentuk aktualisasi dari Nawacita (Nawacita 8) dan kebijakan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang digagas Presiden Joko Widodo dan

Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak mereka mencalonkan diri dalam Pemilu 2014.

Konsepsi pendidikan karakter dalam Gerakan PPK memang menggunakan pemikiran Ki Hadjar Dewantara sebagai basis pengembangannya. Nilai nasionalisme adalah satu nilai utama (prioritas) dalam pendidikan karakter. Namun pemaknaannya masih bersifat usang dan kurang relevan dengan masa kini. Pemaknaannya tidak menyentuh secara menyeluruh aspek internal dari nasionalisme internal (substansi) berupa keadilan sosial, kemerdekaan, demokrasi, kesamaan dan prestasi. Padahal nasionalisme harus dimaknai secara mutakhir sebagai penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Implementasi melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme berupa cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Hal tersebut tidak namak secara eksplisit pada pemaknaan nasionalisme dalam konsepsi pendidikan karakter pada Gerakan PPK.

Perlu ada pemaknaan yang tepat mengenai nasionalisme sebagai muatan dalam pendidikan karakter. Pemaknaan nasionalisme hanya sebatas pada kecintaan terhadap tanah

air tanpa pamrih sebagai simbol patriotisme heroik demi negara yang dicintai. Pemaknaannya harus komprehensif menyentuh semua substansi nasionalisme berupa keadilan sosial, kemerdekaan, demokrasi, kesamaan dan prestasi dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agboola, A., & Chen, K. (2012). Bring Character Education into Classroom. *European Journal of Educational Research*, 1(2), 163–170. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.1.2.163>
- Azca, M. N. (2013). Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim Di Indonesia Pasca Orde Baru. *MAARIF*, 8(1-Juli 2013, hlm, 20.).
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2004). Research Based Character Education. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 591(January), 72–85. <https://doi.org/10.1177/0002716203260082>
- Berkowitz, M. W., & Hoppe, M. A. (2009). Character education and gifted children. *High Ability Studies*, 20(2), 131–142. <https://doi.org/10.1080/13598130903358493>
- Carr, D. (2014). Pendidikan karakter sebagai penanaman kebajikan. In L. P. Nucci & D. Narvaez (Eds.), *Hand book pendidikan moral dan karakter*. Nusa

- Media.
- Dewantara, K. H. (2011). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan* (4th ed.). Yayasan Persatuan Taman Siswa.
- Elias, M. J., Bryan, K., Patrikakou, E. N., & Weissberg, R. P. (2003). Challenges in Creating Effective Home-School Partnerships in Adolescence: Promising Paths for Collaboration. *School Community Journal*, 13(1), 133–153.
- Faturochman, & Kusumawardani, A. (2004). NASIONALISME. *Buletin Psikologi*, 7(2, Desember 2004), 38–48.
- Faturrahman, Setiawan, F., Astuti, W. D., & Khasanah, K. (2022). Analisis kebijakan program penguatan pendidikan karakter. *TSAQOFAH*, 2(4), 466–474.
- Hendarman. (2017). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Sekretariat Jendral kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme & Revolusi Indonesia* (T. K. Bambu (ed.); I). Komunitas Bambu.
- Katılmış, A., Ekşi, H., & Öztürk, C. (2011). Efficiency of social studies integrated character education program. *Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri*, 11(2), 854–859.
- Kemendikbud. (2018). Permendikbud RI No 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. *Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal*, 8–12.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Lay, C. (2006). Nasionalisme dan Negara Bangsa. *Jurnal Ilmu Sosial & Politik*, 10(2), 165–180.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: how our school can teach respect and responsibility*. Bantam books.
- Marzuki. (2012). Intergating character education in the teaching and learning at school. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(1), 33–44.
- Mifdal Zusron Affaqi. (2016). Melihat sejarah nasionalisme Indonesia untuk memupuk sikap kebangsaan generasi muda. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 209–216.
- Muchtar, D., & Suryani, A. (2019). Pendidikan Karakter Menurut Kemendikbud. *Edumas pul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 50–57. <https://doi.org/10.33487/edumas pul.v3i2.142>
- Pala, A. (2011). the Need for Character Education. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, 3(2), 23–32.
- Pangestu, F. (2022). Nasionalisme Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dalam Bingkai

Pancasila. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 2(1), 40–51.
<https://doi.org/10.31315/jpbn.v2i1.6728.g4295>

Sudrajat, A. (2011). Mengapa Pendidikan Karakter? *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 47–58.
<https://doi.org/10.21831/jpk.v1i1.1316>

Williams, M. M. (2000). Models of Character Education: Perspectives and Developmental Issues. *Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*, 39(1 September 2000), 32-40.

Zuchdi, D., & Afifah, W. (2019). *Analisis konten etnografi & grounded theory dan hermeneutika dalam penelitian* (Bumi Aksara (ed.); I).

Zulfiati, H. M. (2019). Pendidikan Karakter Perspektif Ki Hadjar Dewantara Dalam Membentuk Generasi Unggul Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional PGSD*, ISBN 978-6(April), 1–6.